

Gas Subsidi untuk Siapa? Analisis Ekonomi Publik atas Efisiensi dan Pemerataan Subsidi LPG 3 Kg di Jawa Barat

Penulis:

Riki Satia Muharam¹
Budiman Rusli²
Nina Karlina³
Candradewini⁴

Afiliasi:

Program Studi
Administrasi Keuangan
Publik, Sekolah
Vokasi, Universitas
Padjadjaran¹, Program
Studi Administrasi
Publik, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas
Padjadjaran^{2,3,4}

Korespondensi:

r.satia.muhamaram@unpa
d.ac.id

Histori Naskah:

Submit: 20-02-2025
Accepted: 28-02-2025
Published: 30-03-2025

Abstrak: Subsidi LPG 3 Kg merupakan program pemerintah untuk membantu rumah tangga miskin dalam mengakses energi bersih dan terjangkau. Namun, dalam implementasinya di Jawa Barat, kebijakan ini menghadapi tantangan serius, seperti ketidaktepatan sasaran dan pemborosan fiskal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi dan pemerataan subsidi dalam kerangka ekonomi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola penyebab ketidaktepatan subsidi dan dampaknya terhadap masyarakat miskin. Temuan menunjukkan bahwa sekitar 40% subsidi LPG 3 Kg dinikmati oleh rumah tangga mampu, sementara sebagian masyarakat miskin belum mendapat akses. Lemahnya validasi data penerima, pengawasan distribusi, dan keterbatasan sistem digital menjadi penyebab utama. Subsidi LPG 3 Kg di Jawa Barat belum efisien dan adil. Reformasi kebijakan diperlukan melalui pembaruan data penerima, digitalisasi distribusi, dan penguatan pengawasan agar subsidi tepat sasaran, efisien secara fiskal, dan mendukung keadilan sosial.

Kata kunci: distribusi; efisiensi; keadilan sosial; kebijakan publik; subsidi energi.

Pendahuluan

Energi merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan rumah tangga, yang penggunaannya mencakup kegiatan memasak, penerangan, hingga pemanas air. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama rumah tangga berpenghasilan rendah, keberadaan energi yang terjangkau dan mudah diakses menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas hidup sehari-hari. Salah satu bentuk energi yang paling banyak digunakan untuk kebutuhan domestik adalah *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) berukuran 3 kilogram, yang dikenal luas sebagai “gas melon”.

LPG 3 Kg menjadi pilihan utama karena ketersediaannya yang relatif merata, kemudahan penggunaannya, dan harganya yang lebih murah dibandingkan LPG non-subsidi. Harga murah ini dimungkinkan oleh adanya kebijakan subsidi dari pemerintah sebagai upaya untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dari tekanan ekonomi akibat fluktuasi harga energi global (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022). Dalam konteks ini, LPG 3 Kg bukan hanya komoditas, tetapi telah menjadi bagian dari jaring pengaman sosial yang krusial untuk menjaga daya beli dan mencegah kemiskinan energi di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan subsidi LPG 3 Kg menghadapi tantangan, seperti penyalahgunaan oleh rumah tangga mampu dan beban fiskal yang meningkat (INDEF, 2023) (DPR RI, 2021). Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar dalam perspektif



ekonomi publik: sejauh mana subsidi ini tepat sasaran, efisien, dan adil bagi masyarakat serta berkelanjutan secara fiskal dan ekologis.

Kebijakan subsidi LPG 3 Kg merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial ekonomi, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Subsidi ini bertujuan untuk memastikan bahwa rumah tangga miskin tetap memiliki akses terhadap energi bersih dan terjangkau guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk memasak. Dalam kerangka ekonomi publik, subsidi LPG termasuk dalam kategori kebijakan redistribusi yang bertujuan mengurangi ketimpangan dan melindungi kelompok rentan dari tekanan harga pasar. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada ketepatan sasaran serta pengawasan distribusi agar tidak terjadi kebocoran dan penyalahgunaan oleh kelompok non-sasaran. Penelitian oleh Izani dan Taufiq (Izani & Taufiq, 2022) menunjukkan bahwa di Kabupaten Gresik, subsidi LPG 3 Kg tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan jumlah rumah tangga miskin, yang mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap mekanisme penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun subsidi LPG 3 Kg dirancang untuk membantu masyarakat miskin, terdapat berbagai persoalan yang mengurangi efektivitasnya. Salah satu masalah utama adalah penyalahgunaan subsidi oleh rumah tangga mampu yang seharusnya tidak menjadi sasaran dari kebijakan ini. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dalam mekanisme distribusi yang memungkinkan keluarga kaya membeli LPG 3 Kg dengan harga subsidi, sehingga mengurangi kuota yang seharusnya diperuntukkan bagi keluarga miskin. Selain itu, distribusi LPG 3 Kg yang tidak merata di beberapa daerah, terutama di daerah terpencil dan perbatasan, mengakibatkan ketidakadilan dalam akses terhadap energi yang terjangkau. Dampak dari persoalan-persoalan ini juga mengarah pada peningkatan beban fiskal pemerintah yang terus berkembang, karena jumlah subsidi yang semakin besar tidak diimbangi dengan peningkatan efisiensi distribusi. Penelitian oleh Pitoyo dan Sumarto (Pitoyo & Sumarto, 2020) menunjukkan bahwa ketidaktepatan sasaran dalam distribusi subsidi LPG 3 Kg dapat menyebabkan pemborosan anggaran dan mengurangi efektivitas kebijakan dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Selain persoalan efisiensi dan distribusi, tantangan lain yang muncul terkait kebijakan subsidi LPG 3 Kg adalah aspek keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan energi bersih. Meskipun LPG lebih bersih dibandingkan dengan bahan bakar tradisional seperti kayu bakar atau batu bara, penggunaannya tetap memiliki dampak terhadap lingkungan, terutama dalam hal emisi gas rumah kaca. Penggunaan LPG dalam skala besar dapat menyebabkan peningkatan permintaan terhadap gas yang diperoleh dari sumber daya alam yang terbatas, yang berpotensi memengaruhi keseimbangan ekologis. Selain itu, kebijakan subsidi yang tidak dikelola dengan baik dapat memperburuk ketergantungan pada bahan bakar fosil, yang bertentangan dengan tujuan jangka panjang untuk beralih ke energi terbarukan dan bersih. Penelitian oleh Haryanto dan Restiani (Haryanto & Restiani, 2020) menunjukkan bahwa meskipun LPG lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar lainnya, ketergantungan yang terus menerus pada subsidi LPG justru memperlambat transisi menuju penggunaan energi terbarukan, yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kebijakan subsidi LPG 3 Kg merupakan instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan. Namun, efektivitas dan pemerataan distribusinya sering kali menjadi sorotan. Pendekatan ekonomi publik diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana subsidi ini mencapai sasaran yang tepat dan memberikan manfaat maksimal bagi kelompok yang membutuhkan. Analisis ini mencakup aspek efisiensi alokasi sumber daya, keadilan distribusi, dan dampak sosial ekonomi dari kebijakan subsidi tersebut. □

Menurut Pitoyo dan Sumarto (Pitoyo & Sumarto, 2020), evaluasi kebijakan subsidi LPG 3 Kg menunjukkan bahwa meskipun subsidi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, terdapat ketidaktepatan sasaran dalam distribusinya. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga terkait, serta kurangnya data yang akurat mengenai penerima manfaat subsidi. Ketidaktepatan sasaran ini berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran dan mengurangi efektivitas kebijakan dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Evaluasi berbasis ekonomi publik juga penting untuk menilai dampak fiskal dari kebijakan subsidi LPG 3 Kg. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Badan Kebijakan Fiskal, 2020) dalam kajiannya menyatakan bahwa subsidi LPG 3 Kg yang tidak tepat sasaran dapat membebani anggaran negara secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan untuk memastikan subsidi ini lebih tepat sasaran dan efisien, guna mengurangi beban fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kebijakan subsidi LPG 3 Kg di Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, namun efektivitasnya sering dipertanyakan. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek kunci yang perlu dianalisis. Pertama, sejauh mana kebijakan subsidi LPG 3 Kg di Jawa Barat telah mencapai sasaran yang tepat? Pertanyaan ini penting untuk mengevaluasi ketepatan alokasi subsidi kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Kedua, bagaimana efisiensi alokasi subsidi LPG 3 Kg dilihat dari perspektif ekonomi publik? Efisiensi alokasi subsidi ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan dengan optimal dan tidak ada pemborosan. Ketiga, apa dampak dari ketidaktepatan subsidi ini terhadap keadilan sosial dan beban fiskal pemerintah? Ketidaktepatan sasaran dalam distribusi subsidi berpotensi menyebabkan ketidakadilan sosial, serta meningkatkan beban fiskal yang membebani anggaran negara. Dengan menjawab ketiga pertanyaan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang keberhasilan dan tantangan kebijakan subsidi LPG 3 Kg di Jawa Barat.

Studi Literatur

Teori Ekonomi Publik tentang Subsidi

Dalam teori ekonomi publik, subsidi didefinisikan sebagai intervensi pemerintah berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada produsen atau konsumen untuk menurunkan harga suatu barang atau jasa demi mencapai tujuan sosial dan ekonomi tertentu (Stiglitz & Rosengard, 2015). Subsidi bertujuan untuk mengoreksi kegagalan pasar, meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar, serta mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun demikian, efektivitas subsidi sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan efisiensi alokasinya. Subsidi yang efisien adalah subsidi yang menghasilkan manfaat sosial lebih besar dibandingkan biaya fiskal yang dikeluarkan pemerintah. Sebaliknya, subsidi dikategorikan sebagai tidak efisien bila sebagian besar manfaatnya justru dinikmati oleh kelompok yang tidak menjadi sasaran utama, seperti rumah tangga mampu, sehingga menyebabkan pemborosan anggaran dan distorsi pasar (Musgrave & Musgrave, 1989).

Dalam konteks keadilan sosial, prinsip vertical equity menyatakan bahwa kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi berbeda seharusnya diperlakukan secara berbeda dalam penerimaan subsidi, di mana kelompok miskin mendapatkan perlakuan lebih besar. Sedangkan horizontal equity menekankan bahwa individu atau rumah tangga yang berada dalam kondisi ekonomi yang sama harus diperlakukan secara setara dalam memperoleh subsidi (Barr, 2012). Ketidaktepatan dalam alokasi subsidi dapat mengganggu prinsip keadilan ini dan memperlebar kesenjangan sosial. Terdapat trade-off antara efisiensi ekonomi dan pemerataan, di mana upaya untuk meningkatkan pemerataan melalui subsidi seringkali menimbulkan konsekuensi berupa inefisiensi ekonomi jika tidak dilakukan secara cermat. Oleh karena itu, perumusan

kebijakan subsidi harus mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat sosial jangka panjang dan beban fiskal yang ditimbulkan, serta memperhatikan keakuratan data sasaran dan efektivitas distribusinya.

Dampak Ekonomi dan Fiskal

Ketidaktepatan alokasi subsidi LPG 3 Kg memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian lokal maupun nasional. Di tingkat lokal, subsidi yang dinikmati oleh kelompok rumah tangga mampu berpotensi menurunkan daya dorong kebijakan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Sementara di tingkat nasional, alokasi subsidi yang tidak tepat sasaran telah menyebabkan pemborosan fiskal, di mana anggaran negara yang seharusnya dapat digunakan untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur justru terserap pada belanja subsidi energi (TNP2K, 2021) (Lestari & Rahmawati, 2023). Selain itu, ketergantungan masyarakat terhadap subsidi jangka panjang menciptakan beban fiskal yang tidak berkelanjutan dan memperbesar risiko terhadap defisit anggaran, terutama saat harga energi dunia mengalami lonjakan (Badan Kebijakan Fiskal K. , 2020). Ketika subsidi tidak ditujukan secara efektif, negara menghadapi tantangan dalam menjaga efisiensi fiskal dan stabilitas makroekonomi, serta mengalami tekanan untuk melakukan penghematan atau realokasi anggaran publik di masa mendatang (Febrina & Subekti, 2022). Oleh karena itu, reformasi kebijakan subsidi menjadi krusial demi menjaga kesinambungan fiskal dan keadilan sosial dalam jangka panjang.

Studi literatur ini mengungkapkan bahwa kebijakan subsidi LPG 3 Kg di Jawa Barat masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama terkait dengan efisiensi alokasi subsidi dan ketepatan sasaran. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketidaktepatan distribusi subsidi menyebabkan pemborosan fiskal, ketidakmerataan akses terhadap sumber daya energi, dan penurunan efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat miskin. Dalam perspektif teori ekonomi publik, subsidi yang tepat sasaran diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Namun, ketimpangan dalam distribusi subsidi justru menciptakan dampak negatif terhadap ekonomi lokal dan nasional. Meskipun berbagai kajian telah membahas permasalahan ini, terdapat celah penelitian yang perlu dieksplorasi lebih lanjut, yaitu analisis lebih mendalam mengenai Ekonomi Publik atas Efisiensi dan Pemerataan Subsidi LPG 3 Kg.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis efisiensi dan pemerataan subsidi LPG 3 Kg di Jawa Barat. Metode ini dipilih untuk menggali secara mendalam pemahaman tentang ketidaktepatan distribusi subsidi, dampaknya terhadap masyarakat miskin, dan analisis kebijakan yang ada. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidaktepatan subsidi dan dampaknya terhadap perekonomian lokal serta pemerataan sosial. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa stakeholder terkait, seperti penerima subsidi, distributor, agen LPG, dan pejabat pemerintah daerah, untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif tentang pelaksanaan kebijakan subsidi LPG 3 Kg.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi langsung terhadap proses distribusi LPG 3 Kg di beberapa wilayah di Jawa Barat, untuk mengidentifikasi apakah proses tersebut sesuai dengan peraturan yang ada dan apakah distribusinya tepat sasaran. Peneliti juga mengumpulkan data sekunder dari laporan pemerintah, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian sebelumnya mengenai subsidi LPG 3 Kg. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, untuk menemukan pola dan tema utama terkait faktor penyebab ketidaktepatan subsidi, dampaknya terhadap masyarakat miskin, serta efektivitas kebijakan subsidi dalam meningkatkan kesejahteraan. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai kebijakan subsidi yang lebih efisien dan tepat sasaran serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan distribusi subsidi LPG 3 Kg di masa depan.

Pembahasan

Sejauh mana kebijakan subsidi LPG 3 Kg di Jawa Barat telah mencapai sasaran yang tepat?

Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam menjamin akses energi bagi masyarakat miskin dan rumah tangga berpenghasilan rendah. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari, khususnya untuk memasak (Badan Kebijakan Fiskal K. , 2020). Dalam konteks ekonomi publik, kebijakan subsidi ini berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapatan guna mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan yang lebih merata (INDEF, Dampak Subsidi BBM dan LPG 3 Kg Terhadap Kemiskinan Nelayan, 2023). Di Provinsi Jawa Barat, yang merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, distribusi LPG bersubsidi memegang peranan penting dalam mendukung stabilitas sosial-ekonomi masyarakat bawah. Pemerintah melalui PT Pertamina dan jaringan agen resmi mendistribusikan LPG 3 Kg dengan target sasaran rumah tangga miskin, usaha mikro, serta nelayan kecil (Febrian & Paulia, 2024). Namun, dalam praktiknya, tantangan terhadap ketepatan sasaran dan efisiensi distribusi masih menjadi isu yang krusial untuk dikaji lebih dalam, terutama karena masih ditemukan kasus penyalahgunaan dan ketidaktepatan distribusi yang berdampak pada pemborosan anggaran negara (TNP2K, 2021) (Lestari & Rahmawati, 2023).

Kriteria Sasaran Subsidi LPG 3 Kg

Subsidi LPG 3 Kg dirancang sebagai kebijakan afirmatif yang ditujukan untuk membantu rumah tangga miskin dan tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan energi harian. Berdasarkan ketentuan pemerintah, kelompok sasaran subsidi meliputi rumah tangga miskin, pelaku usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran yang memiliki keterbatasan daya beli (Badan Kebijakan Fiskal K. , 2020). Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan bahwa identifikasi penerima subsidi dilakukan dengan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta mekanisme pendaftaran berbasis teknologi melalui sistem MyPertamina dan KTP elektronik (TNP2K, 2021). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa subsidi energi benar-benar dinikmati oleh kelompok yang membutuhkan, bukan rumah tangga mampu yang seharusnya tidak menerima subsidi tersebut. Dasar hukum pelaksanaan program ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 3 Kg, serta diperkuat oleh berbagai regulasi teknis dari Kementerian ESDM dan BPH Migas. Namun dalam pelaksanaannya, permasalahan pada akurasi data dan sistem distribusi masih menjadi tantangan utama dalam menjamin subsidi LPG 3 Kg tepat sasaran (INDEF, Dampak Subsidi BBM dan LPG 3 Kg Terhadap Kemiskinan Nelayan, 2023).

Proses Penyaluran Subsidi LPG 3 Kg

Mekanisme penyaluran subsidi LPG 3 Kg dimulai dari produsen, yakni Pertamina, yang kemudian menyalurkan LPG bersubsidi melalui agen resmi ke pangkalan-pangkalan di seluruh daerah, termasuk di wilayah Jawa Barat. Dari pangkalan inilah masyarakat penerima manfaat dapat mengakses tabung LPG 3 Kg dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Di Jawa Barat, distribusi LPG 3 Kg difokuskan pada wilayah dengan jumlah rumah tangga miskin yang tinggi, seperti Kabupaten Garut, Indramayu, dan Tasikmalaya (BPH Migas, 2021). Pemerintah pusat menetapkan kuota distribusi setiap daerah berdasarkan data permintaan, jumlah penduduk, serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang kemudian dijadikan acuan oleh pemerintah daerah untuk memantau realisasi di lapangan (ESDM, 2022). Peran pemerintah daerah dalam pengawasan distribusi subsidi sangat vital, khususnya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ditugaskan untuk mencegah praktik penyalahgunaan, seperti penimbunan atau penjualan LPG bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak. Namun demikian, lemahnya pengawasan di tingkat pangkalan dan belum terintegrasinya data konsumen membuat celah bagi rumah tangga mampu maupun pelaku usaha non-mikro untuk mengakses subsidi secara illegal (Febrian & Paulia, 2024). Digitalisasi distribusi, seperti penggunaan

sistem MyPertamina dan QR Code, mulai diuji coba untuk mengurangi kebocoran subsidi dan memastikan penyaluran yang lebih tepat sasaran.

Evaluasi Ketepatan Sasaran

Kebijakan subsidi LPG 3 Kg pada dasarnya ditujukan untuk meringankan beban pengeluaran energi rumah tangga miskin. Namun, evaluasi terhadap ketepatan sasaran menunjukkan bahwa penyaluran subsidi ini masih menghadapi tantangan serius. Hasil kajian dari Badan Kebijakan Fiskal (2020) mengungkap bahwa sekitar 40% LPG bersubsidi justru dikonsumsi oleh rumah tangga non-miskin atau mampu, yang seharusnya tidak termasuk dalam kelompok penerima manfaat. Ketidaktepatan ini disebabkan oleh lemahnya verifikasi data penerima serta belum optimalnya integrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, hasil studi TNP2K (2021) menyebutkan bahwa sekitar 30% dari rumah tangga termiskin di Indonesia justru belum mengakses subsidi LPG 3 Kg karena keterbatasan distribusi di daerah terpencil dan minimnya informasi. Di sisi lain, penyalahgunaan juga marak terjadi di tingkat pelaku usaha kecil menengah yang tidak masuk kategori usaha mikro, namun tetap memanfaatkan LPG bersubsidi karena lemahnya pengawasan di lapangan (INDEF, Dampak Subsidi BBM dan LPG 3 Kg Terhadap Kemiskinan Nelayan, 2023). Kondisi ini mencerminkan adanya inefisiensi dalam kebijakan publik yang seharusnya mengutamakan prinsip keadilan distributif. Ketiadaan sistem pendataan yang akurat, lemahnya pengawasan oleh pemerintah daerah, serta belum meratanya implementasi sistem distribusi berbasis digital menjadi faktor utama kegagalan dalam memastikan subsidi LPG 3 Kg tepat sasaran.

Dampak Ketepatan Sasaran terhadap Efektivitas Kebijakan

Efektivitas kebijakan subsidi LPG 3 Kg sangat bergantung pada ketepatan sasaran penerima manfaat. Ketika subsidi berhasil disalurkan kepada rumah tangga miskin, kebijakan ini terbukti mampu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Studi Febrian dan Paulia (2024) menunjukkan bahwa subsidi LPG 3 Kg dapat menekan pengeluaran energi hingga 25% dari total pengeluaran rumah tangga miskin, yang kemudian berdampak pada peningkatan konsumsi pangan dan pendidikan. Namun, ketika subsidi tidak tepat sasaran—yakni dikonsumsi oleh rumah tangga mampu atau pelaku usaha non-mikro—maka tujuan utama kebijakan menjadi terdistorsi. Dalam kondisi seperti ini, subsidi justru berfungsi sebagai bentuk distorsi pasar yang tidak efisien dan menciptakan beban fiskal yang tidak produktif (Badan Kebijakan Fiskal K. , 2020).

Lebih lanjut, kajian INDEF (2023) menegaskan bahwa hanya sekitar 56% subsidi LPG 3 Kg yang benar-benar dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin. Sisanya mengalir ke kelompok ekonomi menengah yang seharusnya tidak menerima subsidi, sehingga dampak terhadap pengurangan kemiskinan menjadi kurang signifikan. Ketidaktepatan sasaran ini tidak hanya mengurangi efektivitas kebijakan dalam konteks kesejahteraan, tetapi juga menambah tekanan terhadap anggaran negara yang bisa dialihkan untuk program sosial lain yang lebih tepat guna. Oleh karena itu, ketepatan sasaran merupakan kunci utama untuk memastikan subsidi LPG 3 Kg benar-benar berperan sebagai instrumen perlindungan sosial yang efektif dan berkeadilan.

Tantangan dalam Mencapai Sasaran yang Tepat

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan subsidi LPG 3 Kg adalah memastikan bahwa bantuan ini benar-benar diterima oleh rumah tangga yang membutuhkan. Di lapangan, terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan subsidi tidak tepat sasaran. Masalah pertama adalah akurasi data penerima manfaat. Meskipun pemerintah telah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan, banyak rumah tangga miskin belum tercatat dalam basis data tersebut, sementara sejumlah rumah tangga mampu masih terdaftar sebagai penerima. Hal ini diungkapkan dalam laporan TNP2K (2021) yang mencatat bahwa 25% rumah tangga miskin tidak masuk dalam DTKS, sehingga terlewat dari program subsidi. Selain itu, sistem distribusi yang belum terdigitalisasi secara menyeluruh membuat LPG bersubsidi rawan disalahgunakan. Di Jawa Barat, laporan dari Badan Kebijakan Fiskal (2020) menyatakan bahwa

penjualan LPG 3 Kg di luar jalur distribusi resmi dan keterlibatan pengecer liar menjadi penyebab utama kebocoran subsidi. Pangkalan sering kali tidak memverifikasi status ekonomi pembeli, sehingga membuka peluang bagi rumah tangga mampu dan pelaku usaha non-mikro untuk mendapatkan LPG bersubsidi. Di sisi lain, pengawasan yang lemah di tingkat daerah juga memperparah persoalan. Kurangnya petugas pengawas, keterbatasan anggaran pengawasan, dan belum optimalnya koordinasi antarinstansi menyebabkan celah dalam kontrol distribusi. Studi oleh Lestari dan Rahmawati (2023) menunjukkan bahwa di beberapa wilayah di Jawa Barat, seperti Kabupaten Subang dan Karawang, lebih dari 35% kuota LPG bersubsidi tidak sampai ke sasaran yang dituju karena penyalahgunaan dan distribusi yang tidak merata. Oleh karena itu, reformasi sistem distribusi berbasis digital, peningkatan validasi data, dan penguatan kapasitas pengawasan daerah menjadi langkah penting untuk mengatasi tantangan ini.

Untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam kebijakan subsidi LPG 3 Kg, beberapa langkah penting perlu diambil. Pertama, penggunaan teknologi dan data yang lebih akurat harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memperbarui dan meningkatkan akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui pemutakhiran data secara berkala serta memperluas cakupan data dengan melibatkan pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi lapangan. Pendekatan berbasis teknologi seperti sistem aplikasi mobile atau platform digital yang memungkinkan masyarakat melaporkan status sosial ekonomi mereka dan memvalidasi informasi secara langsung bisa memperkecil kesalahan dalam identifikasi penerima subsidi (Febrian & Paulia, 2024).

Selanjutnya, untuk mengatasi masalah pengawasan yang lemah, perlu ada peningkatan kapasitas pengawasan di tingkat daerah. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta peningkatan jumlah petugas pengawasan di setiap pangkalan LPG akan sangat membantu mengurangi penyalahgunaan subsidi oleh rumah tangga mampu atau pelaku usaha non-mikro. Penerapan sistem distribusi berbasis digital di seluruh jalur distribusi, yang dapat memonitor secara real-time alokasi dan penggunaan LPG bersubsidi, juga bisa mengurangi kebocoran subsidi yang terjadi di pasar (Badan Kebijakan Fiskal K. , 2020). Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, distributor, dan pihak terkait lainnya juga sangat penting. Untuk itu, pemerintah perlu mengembangkan mekanisme kolaboratif yang melibatkan semua pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah, distributor, hingga masyarakat untuk memastikan distribusi subsidi berlangsung secara transparan dan tepat sasaran. Sebagai contoh, penyesuaian alokasi subsidi berdasarkan tingkat kemiskinan di setiap daerah, yang mempertimbangkan indikator sosial dan ekonomi lokal, akan meningkatkan efektivitas kebijakan dan memastikan bahwa subsidi LPG 3 Kg benar-benar dinikmati oleh mereka yang membutuhkan.

Bagaimana efisiensi alokasi subsidi LPG 3 Kg dilihat dari perspektif ekonomi publik?

Efisiensi alokasi subsidi dalam konteks ekonomi publik merujuk pada penggunaan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan kebijakan dengan biaya minimal. Dalam hal ini, subsidi LPG 3 Kg bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin, khususnya rumah tangga berpenghasilan rendah, dalam memenuhi kebutuhan energi yang semakin meningkat. Efisiensi alokasi ini menjadi penting karena sumber daya publik yang terbatas, seperti anggaran negara, harus dimanfaatkan secara optimal untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam konteks subsidi LPG, efisiensi berarti bahwa subsidi harus mencapai rumah tangga yang tepat, mengurangi kesenjangan sosial, dan meminimalkan kebocoran atau penyalahgunaan subsidi oleh kelompok yang tidak berhak (Badan Kebijakan Fiskal K. , 2020).

Subsidi LPG 3 Kg, yang merupakan salah satu kebijakan utama pemerintah dalam mendukung daya beli masyarakat miskin, bertujuan untuk menurunkan biaya energi bagi rumah tangga dengan penghasilan rendah, yang lebih rentan terhadap fluktuasi harga energi. Dengan alokasi subsidi yang tepat, kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, serta membantu mereka dalam mengakses energi yang lebih terjangkau, sehingga dapat berkontribusi pada pengurangan beban ekonomi dan peningkatan

kualitas hidup mereka (Widiyanto & Darmawan, 2021). Namun, pencapaian tujuan ini memerlukan pengawasan yang ketat dan perbaikan dalam sistem distribusi agar subsidi benar-benar sampai kepada yang berhak dan tidak disalahgunakan.

Teori Ekonomi Publik terkait Subsidi

Subsidi merupakan alat kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengintervensi pasar dengan memberikan dukungan finansial untuk barang atau jasa tertentu. Dalam ekonomi publik, subsidi diharapkan untuk mengatasi kegagalan pasar dan mencapai tujuan sosial yang lebih besar, seperti pemerataan kesejahteraan dan akses terhadap kebutuhan dasar. Secara teoritis, subsidi yang efisien terjadi ketika alokasi sumber daya publik dapat memberikan manfaat sosial yang lebih besar dibandingkan dengan biaya fiskal yang ditanggung oleh pemerintah. Hal ini selaras dengan teori kesejahteraan yang menyatakan bahwa kebijakan harus menghasilkan kesejahteraan yang optimal bagi seluruh masyarakat dengan memperhatikan prinsip efisiensi ekonomi (Musgrave & Musgrave, 1989).

Subsidi yang efisien dalam konteks ekonomi publik dapat diukur dengan dua indikator utama: targeting yang tepat dan minimisasi kebocoran subsidi. Subsidi yang ditujukan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, seperti rumah tangga miskin atau sektor-sektor yang mengalami kesulitan dalam akses energi, dianggap efisien. Sebaliknya, subsidi yang tidak efisien terjadi ketika banyak sumber daya negara diberikan kepada pihak yang lebih mampu, sehingga tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan (Stern, 1987). Pada subsidi LPG 3 Kg, idealnya alokasi subsidi harus mampu menargetkan rumah tangga miskin dengan biaya minimal dan mengurangi distorsi pasar. Namun, kenyataannya banyak rumah tangga yang tidak membutuhkan subsidi, seperti rumah tangga mampu atau pelaku usaha non-mikro, yang turut menerima manfaat dari kebijakan ini. Hal ini menyebabkan kebocoran subsidi, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan sosialnya (Badan Kebijakan Fiskal K. , 2020).

Selanjutnya, dalam teori ekonomi publik, keseimbangan antara manfaat sosial dan biaya fiskal adalah aspek yang sangat penting. Pemberian subsidi harus menciptakan keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dan manfaat yang diterima oleh masyarakat. Jika biaya fiskal untuk memberikan subsidi melebihi manfaat yang diterima oleh kelompok yang membutuhkan, maka kebijakan tersebut tidak efisien. Sebaliknya, subsidi yang memberikan manfaat sosial yang besar dengan biaya fiskal yang relatif rendah dapat dianggap sebagai kebijakan yang berhasil. Dalam hal subsidi LPG 3 Kg, kebocoran subsidi dan distribusi yang tidak tepat sasaran sering kali meningkatkan biaya fiskal tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin (Widiyanto & Darmawan, 2021) (Tirole, 2017).

Mekanisme Alokasi Subsidi LPG 3 Kg

Subsidi LPG 3 Kg di Jawa Barat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan mengurangi beban biaya energi. Proses distribusinya dimulai dari produsen (seperti PT Pertamina) yang memproduksi tabung gas LPG dengan harga subsidi. Kemudian, gas LPG ini didistribusikan melalui distributor dan agen LPG yang bertugas menyalurkannya ke konsumen yang berhak, yakni rumah tangga miskin. Proses distribusi ini diatur oleh Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas yang memiliki peran penting dalam pengawasan untuk memastikan bahwa subsidi sampai kepada yang membutuhkan (Badan Kebijakan Fiskal K. , 2020). Dalam hal alokasi subsidi, anggaran yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan khusus untuk sektor energi. Subsidi LPG 3 Kg disalurkan melalui distributor dan agen LPG yang membeli gas dari produsen dengan harga subsidi dan kemudian menjualnya kepada konsumen dengan harga yang lebih terjangkau. Pemerintah daerah juga berperan dalam memastikan ketepatan sasaran penerima subsidi melalui pengawasan distribusi. Namun, masalah distribusi yang tidak merata dan kebocoran subsidi sering terjadi, di mana rumah tangga mampu atau pelaku usaha terkadang ikut menikmati subsidi ini, meskipun seharusnya mereka tidak berhak (Badan Kebijakan Fiskal K. , 2020). Penting untuk memastikan bahwa distribusi subsidi LPG 3 Kg berjalan dengan baik dan tepat

sasaran agar anggaran negara digunakan dengan efisien dan dapat mencapai tujuan kebijakan tersebut, yaitu membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan energi dengan harga yang lebih terjangkau.

Evaluasi Efisiensi Subsidi LPG 3 Kg

Subsidi LPG 3 Kg di Indonesia bertujuan untuk membantu rumah tangga miskin mengurangi beban biaya energi. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa subsidi ini tidak sepenuhnya tepat sasaran. Meskipun subsidi LPG 3 Kg dirancang untuk meringankan biaya energi rumah tangga miskin, dalam praktiknya, rumah tangga mampu seringkali turut mendapatkan subsidi ini. Hal ini disebabkan oleh kesalahan data dalam penentuan penerima subsidi dan kebocoran subsidi yang memungkinkan rumah tangga mampu juga menikmati subsidi tersebut. Sebuah kajian dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam penyaluran subsidi LPG 3 Kg, yang berpotensi mengurangi manfaat yang diterima oleh rumah tangga miskin (Badan Kebijakan Fiskal K. , 2020)

Dari sisi besaran subsidi, terdapat perbedaan signifikan antara rumah tangga miskin dan mampu. Rumah tangga miskin yang seharusnya menjadi prioritas penerima subsidi ini mungkin hanya menerima subsidi yang relatif kecil, mengingat harga LPG 3 Kg tetap cukup tinggi bagi mereka meskipun disubsidi. Sebaliknya, rumah tangga mampu yang tidak seharusnya menerima subsidi ini justru mendapatkan manfaat yang lebih besar, karena mereka lebih sering membeli LPG dengan jumlah lebih besar. Hal ini memicu pemborosan sumber daya, di mana subsidi yang seharusnya tepat sasaran justru dimanfaatkan oleh pihak yang tidak membutuhkan.

Evaluasi menunjukkan bahwa ketidakefektifan dalam distribusi subsidi ini berpotensi menyebabkan pemborosan fiskal dan mengurangi efisiensi alokasi subsidi itu sendiri. Misalnya, jika subsidi diberikan kepada rumah tangga mampu, hal ini dapat menambah beban fiskal pemerintah yang sebenarnya bisa digunakan untuk program perlindungan sosial lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menyempurnakan sistem distribusi dan memastikan subsidi hanya sampai pada rumah tangga miskin yang benar-benar membutuhkan, sebagaimana disarankan dalam laporan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K, 2021).

Keterkaitan dengan Efisiensi Fiskal Pemerintah

Subsidi LPG 3 Kg memiliki dampak signifikan terhadap anggaran fiskal pemerintah. Sebagai kebijakan yang dirancang untuk membantu rumah tangga miskin, subsidi ini menyedot sebagian besar anggaran negara yang dialokasikan untuk sektor energi. Berdasarkan laporan dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2020), pengeluaran untuk subsidi LPG telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah subsidi ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi kelompok yang seharusnya menerima bantuan tersebut, ataukah lebih banyak diserap oleh rumah tangga mampu yang tidak memenuhi kriteria penerima subsidi. Selain itu, ketidaktepatan dalam distribusi dapat memperburuk pemborosan anggaran negara yang seharusnya bisa dialokasikan untuk program-program lain yang lebih produktif.

Apakah Subsidi LPG 3 Kg Dapat Dipertahankan Tanpa Membebani Keuangan Negara?

Melihat besaran pengeluaran pemerintah untuk subsidi LPG 3 Kg, penting untuk mengevaluasi apakah subsidi ini dapat dipertahankan dalam jangka panjang tanpa membebani keuangan negara. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K, 2021) mencatat bahwa meskipun subsidi LPG membantu mengurangi beban masyarakat miskin, besarnya subsidi yang dialokasikan seringkali tidak sebanding dengan dampak yang diberikan. Sumber daya yang lebih besar dibutuhkan untuk menyesuaikan subsidi dengan kebutuhan riil rumah tangga miskin. Tanpa adanya reformasi dalam pengalokasian dan distribusi subsidi, pemerintah mungkin akan menghadapi kesulitan dalam mempertahankan kebijakan subsidi ini dalam jangka panjang tanpa menambah tekanan pada anggaran negara.

Dalam konteks anggaran publik, perlu dilakukan analisis apakah subsidi LPG 3 Kg memberikan nilai yang optimal dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk program-program lain, seperti pembangunan infrastruktur atau pelayanan sosial. Mengingat keterbatasan anggaran negara, lebih banyaknya dana yang dialokasikan untuk subsidi LPG 3 Kg berpotensi mengurangi dana yang tersedia untuk sektor-sektor yang juga penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Jika subsidi tidak tepat sasaran, maka kebijakan ini bisa mengurangi efektivitas alokasi anggaran secara keseluruhan, yang dapat berimbas pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebuah kajian oleh Badan Kebijakan Fiskal (2020) menekankan bahwa pemborosan dalam subsidi energi dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk mendanai sektor-sektor vital lainnya, yang pada akhirnya dapat merugikan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Peningkatan Efisiensi Alokasi Subsidi

Untuk meningkatkan efisiensi alokasi subsidi LPG 3 Kg, beberapa langkah perlu dipertimbangkan oleh pemerintah, di antaranya:

- Penerapan Sistem Data yang Lebih Tepat: Salah satu cara yang paling efektif untuk memastikan subsidi tepat sasaran adalah dengan memperbarui dan meningkatkan sistem data yang digunakan untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin. Menggunakan data yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi, seperti data dari Badan Pusat Statistik (BPS) atau data sosial ekonomi yang diperoleh dari lembaga terkait, dapat membantu mengurangi kesalahan dalam penyaluran subsidi. Misalnya, penggunaan kartu identitas digital atau sistem berbasis biometrik untuk mengidentifikasi penerima subsidi dapat memastikan subsidi benar-benar sampai kepada yang membutuhkan (Febrian & Paulia, 2024).
- Pengawasan Distribusi yang Lebih Ketat: Pengawasan distribusi subsidi juga perlu diperketat. Pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap jaringan distribusi, dari agen hingga konsumen, guna memastikan tidak ada penyelewengan atau penyalahgunaan subsidi oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Pengawasan yang efektif juga melibatkan penegakan hukum yang tegas terhadap penyalahgunaan subsidi, seperti penjualan LPG subsidi kepada rumah tangga mampu. Salah satu cara untuk meningkatkan pengawasan adalah dengan menggunakan sistem pelaporan digital yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan penyalahgunaan dengan mudah.
- Penggunaan Teknologi untuk Memastikan Subsidi Sampai ke Rumah Tangga yang Tepat: Penggunaan teknologi canggih seperti aplikasi berbasis smartphone atau sistem pembayaran digital dapat membantu memastikan bahwa subsidi diterima oleh rumah tangga yang berhak. Teknologi ini dapat memfasilitasi penyaluran subsidi secara langsung, tanpa melibatkan perantara yang bisa menjadi sumber ketidakefektifan. Dengan memanfaatkan sistem ini, pemerintah bisa meminimalkan penyalahgunaan subsidi.
- Pengalihan Subsidi ke Sektor yang Mendukung Transisi Energi: Selain efisiensi distribusi subsidi, pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk mengalihkan sebagian subsidi ke sektor-sektor yang lebih mendukung transisi energi atau efisiensi energi jangka panjang. Misalnya, mengalokasikan sebagian anggaran subsidi untuk pengembangan energi terbarukan, seperti solar panel atau biogas, yang dapat memberikan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memitigasi dampak perubahan iklim (Badan Kebijakan Fiskal K. , 2020).

Apa dampak dari ketidaktepatan subsidi ini terhadap keadilan sosial dan beban fiskal pemerintah?

Pendahuluan kebijakan subsidi LPG 3 Kg bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rumah tangga berpenghasilan rendah dengan menyediakan akses energi yang terjangkau. Subsidi ini diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi rumah tangga miskin, yang sering kali kesulitan dalam memenuhi kebutuhan energi dasar mereka. Namun, dalam praktiknya, terdapat masalah ketidaktepatan sasaran dalam alokasi subsidi ini, yang sering kali menyebabkan subsidi tidak mencapai

rumah tangga yang benar-benar membutuhkan. Hal ini berpotensi menurunkan efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan utamanya. Ketidaktepatan sasaran tersebut tidak hanya mempengaruhi keadilan sosial dengan memberikan subsidi kepada rumah tangga yang mampu, tetapi juga berisiko menambah beban fiskal pemerintah, karena pengeluaran subsidi menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme distribusi dan alokasi subsidi agar lebih tepat sasaran, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Konsep Keadilan Sosial dalam Kebijakan Subsidi

Konsep keadilan sosial dalam konteks kebijakan subsidi LPG 3 Kg merujuk pada prinsip bahwa setiap individu, terutama yang berasal dari rumah tangga miskin, harus memiliki akses yang adil terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam hal ini, subsidi LPG 3 Kg diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan bantuan kepada kelompok yang lebih rentan dan membutuhkan, yakni rumah tangga berpenghasilan rendah. Namun, distribusi subsidi yang tidak tepat sasaran justru berpotensi menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya ini. Misalnya, jika subsidi disalurkan kepada rumah tangga yang mampu, maka mereka akan mendapat keuntungan yang seharusnya diperuntukkan bagi yang lebih membutuhkan. Ketidaksetaraan ini dapat memperburuk kesenjangan ekonomi dan sosial, menghalangi tercapainya tujuan kebijakan subsidi itu sendiri, serta membebani anggaran negara.

Pentingnya subsidi yang tepat sasaran dalam memastikan tercapainya keadilan sosial tidak dapat dipandang sebelah mata. Dengan memastikan bahwa subsidi hanya diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan, pemerintah dapat mengoptimalkan dampak kebijakan ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Subsidi yang tepat sasaran juga memastikan bahwa anggaran negara digunakan dengan lebih efisien, tanpa memboroskan sumber daya untuk kelompok yang tidak membutuhkan. Oleh karena itu, kebijakan subsidi harus dirancang dan diterapkan dengan cermat untuk menghindari ketidaktepatan sasaran yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

Penyebab Ketidaktepatan Subsidi LPG 3 Kg

Ketidaktepatan subsidi LPG 3 Kg dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait, yang menghambat tujuan kebijakan dalam mencapai sasaran yang tepat. Salah satu penyebab utama adalah ketidaktepatan data penerima subsidi. Dalam banyak kasus, data yang digunakan untuk menentukan siapa yang berhak menerima subsidi sering kali tidak akurat atau usang. Hal ini terjadi karena sistem pencatatan yang kurang terintegrasi dan tidak update, serta adanya kesalahan dalam verifikasi data kemiskinan yang dapat menyebabkan rumah tangga mampu tercatat sebagai penerima subsidi (Badan Kebijakan Fiskal K. , 2020). Selain itu, distribusi yang tidak merata juga menjadi masalah, di mana di beberapa daerah, terutama yang jauh dari pusat kota, distribusi LPG 3 Kg lebih sulit diakses oleh rumah tangga miskin, sementara di daerah lain yang lebih dekat dengan pusat distribusi, subsidi bisa mencapai rumah tangga yang tidak layak menerima bantuan tersebut.

Kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan juga menjadi faktor penyebab ketidaktepatan subsidi. Pengawasan yang lemah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, menyebabkan kesulitan dalam memastikan apakah subsidi benar-benar sampai ke penerima yang tepat. Selain itu, adanya potensi manipulasi di tingkat distributor atau agen LPG yang tidak transparan dalam mendistribusikan subsidi, dapat memperburuk ketidaktepatan sasaran. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2021 menunjukkan bahwa di beberapa daerah di Jawa Barat, termasuk daerah pedesaan, terdapat distribusi subsidi yang tidak tepat sasaran, di mana rumah tangga mampu mendapat akses yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin (TNP2K, 2021). Fenomena ini juga terlihat dalam studi yang dilakukan oleh Febrian & Paulia (2024) yang mengungkapkan bahwa di Kota Surabaya, distribusi subsidi LPG 3 Kg mengalami kebocoran akibat adanya rumah tangga

yang tidak membutuhkan subsidi namun tetap menerima alokasi tersebut, mengurangi efektivitas dari kebijakan ini.

Dampak Ketidaktepatan Subsidi terhadap Keadilan Sosial

Ketidaktepatan dalam alokasi subsidi LPG 3 Kg memiliki dampak yang signifikan terhadap keadilan sosial di masyarakat. Salah satu dampaknya adalah peningkatan ketimpangan antara rumah tangga miskin dan mampu. Subsidi yang seharusnya diberikan kepada rumah tangga miskin justru dapat dialihkan kepada rumah tangga yang lebih mampu secara ekonomi. Hal ini mengarah pada ketidakmerataan dalam distribusi manfaat subsidi, di mana kelompok yang lebih membutuhkan subsidi justru tidak mendapatkan manfaat yang sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut (Badan Kebijakan Fiskal K. , 2020).

Ketidaktepatan ini memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi yang sudah ada, menciptakan ketidakadilan di kalangan masyarakat. Rumah tangga miskin yang seharusnya mendapatkan dukungan melalui subsidi LPG 3 Kg menjadi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar energi mereka, yang berpotensi meningkatkan beban ekonomi mereka. Sementara itu, rumah tangga yang mampu tetap memperoleh subsidi meskipun tidak memerlukan bantuan tersebut, yang pada akhirnya mengurangi daya tarik kebijakan ini sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan. Ketidaktepatan dalam distribusi subsidi LPG 3 Kg juga berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat miskin. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertahan hidup, karena energi adalah salah satu kebutuhan dasar yang sangat mempengaruhi kualitas hidup rumah tangga. Apabila subsidi tidak sampai ke rumah tangga miskin, maka mereka akan semakin terbebani oleh biaya energi, yang dapat memengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Rahmawati (2023) menunjukkan bahwa subsidi LPG yang tidak tepat sasaran menyebabkan rumah tangga miskin kesulitan untuk mengakses LPG dengan harga subsidi yang seharusnya mereka terima. Sementara rumah tangga mampu tetap dapat membeli LPG dengan harga subsidi, yang jelas tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang seharusnya ditegakkan oleh kebijakan subsidi ini.

Dampak Ketidaktepatan Subsidi terhadap Beban Fiskal Pemerintah

Ketidaktepatan dalam alokasi subsidi LPG 3 Kg memiliki dampak langsung terhadap beban fiskal pemerintah. Ketika subsidi tidak sampai pada rumah tangga yang tepat sasaran, jumlah anggaran yang digunakan untuk subsidi menjadi lebih tinggi daripada yang seharusnya, karena rumah tangga mampu juga menerima subsidi. Pemborosan anggaran ini sangat berpotensi mengurangi efektivitas penggunaan dana publik di sektor-sektor lain yang lebih mendesak, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Menurut kajian yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI (2020), alokasi subsidi yang tidak tepat sasaran meningkatkan pemborosan dan menurunkan efisiensi belanja negara.

Lebih lanjut, ketidaktepatan dalam distribusi subsidi LPG 3 Kg juga dapat memperburuk situasi fiskal jangka panjang. Pengeluaran subsidi yang tidak efisien mengurangi kapasitas pemerintah untuk mengalokasikan dana bagi program-program yang lebih mendukung pertumbuhan ekonomi atau pengentasan kemiskinan secara lebih langsung. Pengeluaran yang tidak terkendali juga berisiko meningkatkan defisit anggaran, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kestabilan ekonomi negara dan menambah beban utang. Selain itu, pemborosan subsidi LPG kepada rumah tangga yang tidak membutuhkan dapat memicu pembatasan atau pengurangan kebijakan subsidi di masa depan. Kebijakan subsidi yang tidak tepat sasaran dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan kebijakan subsidi energi, serta memaksa pemerintah untuk membuat penyesuaian yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K, 2021) menunjukkan bahwa penyalahgunaan subsidi LPG oleh rumah tangga mampu dapat memperburuk ketidakseimbangan fiskal, sehingga pemerintah perlu lebih hati-hati dalam menetapkan alokasi subsidi di masa depan.

Implikasi Ketidaktepatan Subsidi terhadap Kebijakan Pemerintah

Ketidaktepatan dalam alokasi subsidi LPG 3 Kg dapat memiliki dampak yang luas terhadap kebijakan fiskal dan kebijakan publik secara keseluruhan. Salah satu implikasi utama adalah potensi penyesuaian kebijakan subsidi atau pengalihan anggaran untuk sektor-sektor lain yang lebih mendesak. Ketika subsidi tidak tepat sasaran, alokasi dana yang besar untuk subsidi yang tidak efisien dapat membatasi ruang fiskal untuk investasi pada sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang juga penting untuk kesejahteraan masyarakat. Penyaluran subsidi kepada rumah tangga yang mampu berpotensi mengurangi anggaran yang seharusnya digunakan untuk program-program yang lebih produktif dan dapat mengurangi ketimpangan sosial.

Selain itu, ketidaktepatan dalam alokasi subsidi LPG 3 Kg dapat mengarah pada penurunan efektivitas kebijakan publik secara keseluruhan, terutama dalam mencapai tujuan utama subsidi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Ketika subsidi tidak menjangkau rumah tangga yang benar-benar membutuhkan, kebijakan tersebut tidak hanya gagal dalam meningkatkan kesejahteraan yang diinginkan, tetapi juga memperburuk ketidakadilan sosial. Hal ini dapat menyebabkan rasa ketidakpuasan dan kekecewaan di kalangan masyarakat miskin yang merasa tidak mendapatkan manfaat dari kebijakan yang seharusnya ditujukan untuk mereka. Penurunan efektivitas kebijakan ini juga dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan kebijakan sosial yang lebih luas. Sebagaimana dijelaskan dalam laporan TNP2K (2021), ketidaktepatan dalam distribusi subsidi tidak hanya mengurangi manfaat bagi mereka yang membutuhkan, tetapi juga dapat menyebabkan pemborosan sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk kebijakan yang lebih efisien dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kesimpulan

Kebijakan subsidi LPG 3 Kg merupakan bentuk intervensi pemerintah yang bertujuan untuk melindungi rumah tangga miskin dari tekanan biaya energi dengan menyediakan akses terhadap energi yang lebih terjangkau. Namun, berdasarkan temuan penelitian ini, subsidi tersebut belum sepenuhnya tepat sasaran dan efisien. Ketidaktepatan sasaran terjadi akibat lemahnya validasi data penerima manfaat, buruknya pengawasan distribusi di lapangan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam sistem distribusi. Efektivitas subsidi juga terhambat oleh tingginya kebocoran, di mana rumah tangga mampu dan pelaku usaha non-mikro masih dapat mengakses LPG bersubsidi. Hal ini tidak hanya mengurangi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat miskin, tetapi juga meningkatkan beban fiskal negara secara signifikan. Ketidaktepatan ini menimbulkan ketidakadilan sosial dan mengancam keberlanjutan fiskal pemerintah dalam jangka panjang. Dalam perspektif ekonomi publik, subsidi yang tidak efisien dan tidak adil bertentangan dengan prinsip alokasi sumber daya yang optimal dan keadilan distributif. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kebijakan subsidi LPG 3 Kg dengan fokus pada: (1) peningkatan akurasi data penerima melalui pembaruan DTKS dan integrasi sistem digital, (2) penguatan pengawasan distribusi di tingkat daerah, dan (3) penerapan sistem teknologi berbasis identitas digital atau biometrik guna memastikan subsidi hanya diterima oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan. Melalui reformasi tersebut, kebijakan subsidi diharapkan dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Jawa Barat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Sivitas Akademik Universitas Padjadjaran atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para informan yang telah bersedia memberikan informasi. Penulis mengapresiasi masukan konstruktif dari para reviewer Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA) yang telah membantu memperbaiki kualitas artikel ini.

Daftar Pustaka

- Badan Kebijakan Fiskal, K. (2020). Kajian Kebijakan Subsidi LPG Tabung 3 Kg Tepat Sasaran.
- Badan Kebijakan Fiskal, K. (2020). Kajian Kebijakan Subsidi LPG Tabung 3 Kg Tepat Sasaran.
- Barr, N. (2012). *Economics of the Welfare State (5th ed.)*. Oxford University Press.
- BPH Migas. (2021). *Laporan Tahunan BPH Migas 2021*. Jakarta: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- DPR RI. (2021). Permasalahan dan Tantangan Transformasi Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg. Analisis Ringkas Cepat Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- ESDM, K. (2022). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2022*.
- Febrian, A., & Paulia, V. (2024). Evaluasi Program Distribusi Subsidi LPG 3 Kg di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 194-196.
- Febrina, A., & Subekti, T. (2022). Dampak Kebijakan Subsidi Energi terhadap Belanja Pemerintah di Sektor Sosial. *Jurnal Anggaran dan Kebijakan Fiskal*, 221-234.
- Haryanto, J., & Restiani, F. (2020). Dampak Penurunan Emisi GRK pada Program Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg. *Jurnal Konservasi Sumberdaya Alam*, 1-10.
- INDEF. (2023). *Dampak Subsidi BBM dan LPG 3 Kg Terhadap Kemiskinan Nelayan*. Policy Brief No. 3/2023.
- INDEF. (2023). *Dampak Subsidi BBM dan LPG 3 Kg Terhadap Kemiskinan Nelayan*.
- Izani, M., & Taufiq, M. (2022). Pengaruh Penyaluran Bantuan Langsung Tunai, Beras Miskin, dan Subsidi LPG 3 Kg terhadap Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Gresik. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 139-146.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, E. (2022). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Lestari, L., & Rahmawati, M. (2023). Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kelangkaan Gas LPG Subsidi di Indonesia. *Journal of Economics and Social Sciences*, 115-116.
- Musgrave, R., & Musgrave, P. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill.
- Pitoyo, A., & Sumarto, M. (2020). *Evaluasi Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Gas Serta Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.
- Stern, N. (1987). *The Theory of Taxation for Developing Countries*. Oxford University Press.
- Stiglitz, J., & Rosengard, J. (2015). *Economics of the Public Sector*. W.W. Norton & Company.
- Tirole, J. (2017). *Economics for the Common Good*. Princeton University Press.
- TNP2K, T. (2021). Analisis Transformasi Subsidi Energi: Subsidi LPG Tabung 3 Kg dan Subsidi Listrik Rumah Tangga.
- Widiyanto, A., & Darmawan, R. (2021). Efektivitas Subsidi LPG 3 Kg dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 45-56.